MRABJ

Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal

journal homepage: <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar)

Ninda Riskia Putri, Agustiawan*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email: agustiawan@umri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 02 June 2020

Accepted: 06 August 2020

Available Online: 06 August 2020

Keywords:

Standar Akuntansi Pemerintah,
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Teknologi Informasi,
Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Sampel penelitian adalah pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar. Pengumpul data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responde. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kampar harus menjaga kualitas laporan keuangannya dengan menerapkan standar akuntansi secara konsisten, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan, serta terus meningkatkan pemahaman akuntansi kepada pegawainya.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan laporan keuangan sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintahan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu pemerintah dalam satu periode (Oktarina dkk, 2016). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yaitu berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang mempunyai prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah banyak diterima secara umum (Armel, 2017). Melalui penerapan standar akuntansi pemerintah dapat

disusun laporan keuangan yang bermanfaat (*useful*). Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Bastian, 2010).

Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintah saat ini masih belum maksimal. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerahnya saja, tetapi dalam hal ini sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran dalam proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan yang dapat

dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Boututihe, 2015). Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang baik (Halim, 2012).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hasil opini audit ini tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu menjadi contoh bagi daerah lainnya. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kampar agar bisa juga diterapkan di daerah lain.

Hasil penelusuran dan studi pustaka yang dilakukan mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Triwardana (2017) menjelaskan penerapan sistem akuntansi pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Andini dan Yusrawati (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang Ihsanti (2014) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Diani (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015) mengatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Chodijah (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Setyowati dkk (2016) pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tersebut ternyata terjadi ketidak-konsistenan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mereplikasi kembali penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kabupaten Kampar karena telah mendapatkan opini WTP secara terus menerus dalam dua tahun terakhir yang bisa dijadikan *benchmark* bagi daerah lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerahnya.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori Kelembagaan (Institutional Theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidak-konsistenan dalam tampilan formal organisasi (DiMaggio dan Powell, 1991). Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan *isomorphism* (Ahyaruddin dan Akbar, 2017). Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk menginterpretasikan dan menjelaskan bukti empiris tersebut dari perspektif teori institusional (*Institutional Theory*).

Menurut DiMaggio dan Powell (1991) Teori kelembagaan merupakan teori yang menjadi penjelas yang kuat dan populer bagi tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal sosial, ekspektasi masyarakat dan lingkungan (Chodijah, 2018). Faktor-faktor tersebut cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain negara (*state*), sektor swasta (*private*), akademisi dan masyarakat (*society*). Organisasi pemerintahan selaku pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal. Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, organisasi rentan juga terhadap tekanan eksternal. Teori institusional juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang berkualitas dapat diciptakan didorong oleh adanya fenomena *isomorfisme* (*koersif, mimetik, dan normatif*) (Budiawan dan Budi, 2014).

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi pemerintahan merupakan konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang diterapkan baik di pemerintahan pusat, Pemerintahan provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Bastian (2010) menjelaskan SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Tujuan dari penerapan standar akuntansi ini adalah menjadi acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017) yang menyatakannya bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarina dkk (2016) bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, maka hipotesis pertama diajukan yaitu:

H1: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

2.3 Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) dan Yuliza (2018), menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2015) mengatakan

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua diajukan yaitu:

H2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

2.4 Pemahaman Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka orang-orang yang melaksanakan tugas dalam laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku. Menurut Diani (2014) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baiknya pemahaman akuntansi para pejabat di instansi pemerintah tersebut maka akan menambah kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan, sebaliknya, jika pejabat tersebut tidak paham dengan akuntansi, maka secara langsung juga akan membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dipercaya.

H3: Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan kemajuan teknologi informasi (TI) yang pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Chodijah (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Alamsyah dkk (2014) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis keempat diajukan yaitu:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena kegiatan dinas atau badan berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kebanyakan penelitian terdahulu meneliti di SKPD/OPD. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data suvei di peroleh dari penyebaran kuesioner pada 32 OPD di lingkungan Kabupaten Kampar dengan sampel penelitian ini berjumlah 80. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS karena Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengukur hubungan, pengaruh secara linear antara dua atau lebih variabel independen.

3.1 Pengukuran Variabel

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini diukur dengan indikator yang dilakukan oleh peneliti Triwardana (2017). Variabel ini mempunyai 28 butir pertanyaan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menggunakan instrument penelitian dari Triwardana (2017). Pertanyaan berjumlah 9 butir. Variabel pemahaman akuntansi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari penelitian Fatmala (2014). Kuisisioner tersebut menggunakan skala Likert dengan 13 butir pertanyaan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kuesioner yang dikembangkan dari penelitian Armel (2017). Kuisisioner di ukur menggunakan skala Likert dengan 7 butir pertanyaan. Terakhir, variable kualitas laporan keuangan menggunakan instrument penelitian

Triwardana (2017). Jumlah item terdiri dari sembilan butir pertanyaan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Profil Responden

Tabel 1: Karakteristik Demografi Responden (N=80)

Karakteristik Responden		Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	41	51.25%
	Perempuan	39	48.75%
Kelompok Umur	21-35	35	43.72%
	46-50	35	43.72%
	>50	10	12.5%
Tingkat Pendidikan	SMA	9	11.25%
	Diploma	14	17.5%
	Sarjana	51	63.75%
	Master	4	5 %
Latar Belakang Pendidikan	Lainnya	2	2.5 %
	Akuntansi	10	12.20%
	Lainnya	40	48.78%
	Tidak Menjawab	32	39.02%
Pengalaman Kerja	<5 tahun	38	47.5%
	6-10 tahun	33	41.25%
	>10 tahun	9	11.25%

Tabel 1 di atas menjelaskan tentang profil responden berdasarkan jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 51,25%, sedangkan perempuan sebesar 48,75%. berdasarkan kelompok umur adalah rata-rata berumur 20-25 tahun yaitu sebanyak 35 orang atau 43,75%, umur 36-50 tahun sebanyak 35 orang atau 43,75% dan umur > 50 tahun sebanyak 10 orang atau 12,5%. berdasarkan gelar/strata sebagai berikut, SLTA sebanyak 9 orang atau 11,25%, berpendidikan D3 sebanyak 14 orang atau 17,5%, berpendidikan S1 sebanyak 51 orang atau 63,75%, berpendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 5%, dan S3 sebanyak 2 orang atau 2,5%. berdasarkan lama berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah rata-rata lama berada selama <5 tahun yaitu sebanyak

38 orang atau 47,5%, lama berada 5-10 yaitu sebanyak 33 orang atau 41,25%, lama berada > 10 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 11,25%.

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa nilai minimum dari total pertanyaan variabel adalah 30, untuk nilai maksimum sebesar 45, rata-rata nilai dari total pernyataan adalah 38,46, dengan standar deviasi 2,624, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah bahwa nilai minimum dari total pertanyaan variabel adalah 89, untuk nilai maksimum sebesar 137, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 119,08, dengan standar deviasi 8,665, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bahwa nilai minimum dari total pertanyaan variabel adalah 32, untuk nilai maksimum sebesar 44, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 38,21, dengan standar deviasi 2,406, variabel Pemahaman Akuntansi bahwa nilai minimum dari total pertanyaan variabel adalah 35, untuk nilai maksimum sebesar 65, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 50,72, dengan standar deviasi 7,407, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi bahwa nilai minimum dari total pertanyaan variabel adalah 21, untuk nilai maksimum sebesar 35, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 29,46 dengan standar deviasi 2,700.

Tabel 2: Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kualitas LK Pemda	80	30	45	38,46	2,624
Penerapan SAP	80	89	137	119,08	8,665
Penerapan SAKD	80	32	44	38,21	2,406
Pemahaman Akuntansi	80	35	65	50,72	7,407
Pemanfaatan TI	80	21	35	29,46	2,700
Valid N (listwise)	80				

Tabel 3 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	,702	5,105		,138	,891	
Penerapan_SAP	,087	,029	,286	2,990	,004	Terdukung
Sistem_akuntansi_keuangan_daerah	,442	,103	,405	4,287	,000	Terdukung
Pemahaman_akuntansi	,072	,034	,205	2,163	,034	Terdukung
Pemanfaatan_teknologi_informasi	,233	,090	,240	2,582	,012	Terdukung

Adjusted R Squared = .474

Sig-F = .000

Ukuran Sampel = 80

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

4.2 Hasil Analisis Data

Berdasarkan Tabel 3 uji regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS versi 20, maka menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,702 Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan bernilai nol (0), maka variabel dependen (*Beta*) sebesar 0,702. Maka penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,702. Nilai koefisien Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk variabel penerapan SAP sebesar 0,087 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah satu satuan maka akan menaikkan variabel Kualitas Laporan Keuangan naik sebesar 0,087 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Nilai koefisien sistem akuntansi keuangan daerah untuk variabel penerapan SAKD sebesar 0,442 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sistem akuntansi keuangan daerah satu satuan maka akan menaikkan variabel Kualitas Laporan Keuangan naik sebesar 0,442 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien pemahaman akuntansi untuk variabel pemahaman akuntansi sebesar 0,072 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pemahaman akuntansi satu satuan maka akan menaikkan variabel Kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,072 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Nilai koefisien Pemanfaatan teknologi informasi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,233 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pemanfaatan teknologi informasi satu satuan maka akan menaikkan variabel Kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,233 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur- unsur yang telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah berbasis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat peristiwa ekonomi serta melaporkan pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi itu terjadi. Penerapan basis akrual diharapkan dapat memperlihatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya ekonomi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017).

Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas. Laporan keuangan dapat berkualitas karena transaksi yang dilaporkan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan juga disajikan secara jujur dan lengkap. Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti bahwa H_2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangannya, dengan adanya penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah dapat mempermudah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi dari computer. Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi serta meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andini dan Yusrawati (2015) Menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Apabila sejak awal penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para penggunaannya.

4.5 Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uji hipotesis nilai signifikan pada variabel pemahaman akuntansi adalah 0,034 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa variabel pemahaman akuntansi (X_3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan, maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah sebagai *steward* atau pelayanan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan sehingga dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah harus memuat laporan-laporan keuangan yang harus dipenuhi agar outputnya lebih baik. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman akuntansi yang baik agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) yang berjudul menyatakan bahwa pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik pemahaman akuntansi maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.

4.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uji hipotesis nilai signifikan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,012 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_4) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif menjelaskan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi berdampak baik pula terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan serta dapat menghindari kesalahan

dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan cara memanfaatkan teknologi dan informasi yang sangat pesat disertakan potensi pemanfaatan dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chodijah (2018) yang menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan apabila teknologi dimanfaatkan dengan baik akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunan sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

5. Kesimpulan

Kualitas laporan keuangan pemerintah biasanya dinilai dari opini yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh secara empiris maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah semakin baik maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Semakin baik Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Pemahaman Akuntansi menunjukkan bahwa semakin baik Pemahaman Akuntansi maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan bahwa semakin baik Pemanfaatan Teknologi Informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki

kualitas yang baik. Dapat dilihat dari ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dilakukan evaluasi agar bisa diambil suatu saran bagi peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kampar; (2) penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner tanpa dilengkapi dengan metode wawancara, sehingga jawaban responden rawan terhadap informasi yang bias; (3) dari hasil pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner sebanyak 128 hanya kembali 80 kuesioner yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesibukan responden dan waktu yang kurang tepat.

Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kampar untuk melakukan evaluasi dan pertimbangan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, melakukan system informasi akuntansi yang terkomputerisasi, serta meningkatkan kompetensi pegawai terhadap pemahaman akuntansinya.

Daftar Pustaka

- Ahyaruddin, M., dan Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata?, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 21 No. 2. Hal. 105-117.
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., dan Muslih, M. (2014). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok), *Majalah Ilmiah Unikom*, 15 (2), pp. 201–210.

- Andini dan Yusrawati. (2015). The Influence of Human Resource Competence And Application Of Local Financial Accounting System To The Quality Of Local Financial Report (At District Device Work Unit (SKPD) Empat Lawang Regency South Sumatera. *Journal Of Economics Management And Accounting*. Vol. 24. No. 1.
- Armel, R. Y. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jom Fekon*. Vol. 4. No. 1. Hal. 105–119.
- Bastian, I. (2010). *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Botutihe, T. H. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*. Vol. 2. No. 1. Hal. 1-9.
- Budiawan, D. A., dan Budi, S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2. No. 1. Hal. 276-288.
- Chodijah, S. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*. Vol. 8 No. 1. Hal. 34–48.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman. *E-Journal Unp*. Vol. 2. No.1.
- DiMaggio, P. J. dan Powell, W. W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. The New Institutionalism in Organizational Analysis* (p.63-82). The University of Chicago Press: Chicago.
- Fatmala. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah). *E-Journal Unsrat*. Vol. 4. No.2. Hal. 768-777
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *E-journal Unp*. Vol. 2. No. 3.
- Modo, S. M. *et al*. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 2. No. 2.
- Nova, W. S. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada SKPD Kabupaten Sijunjung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Oktarina, M., Raharjo, K. dan Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang', *Padanara Journal of Accounting*, 2(2), p. 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Setyowati, L., Wika I., R. D. P. (2016).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja*,
Vol. 20. Hal. 4. Hal. 179–191.

Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Skpd (Studi Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Kampar). *Jom Fekon*.

Vol. 4. No. 4. Hal. 641–655.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.*

[www://Pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/30/bpk-mulai-memeriksa-laporan-keuangan-pemkab-kampar-2017-ini-pesan-bupati-aziz](http://Pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/30/bpk-mulai-memeriksa-laporan-keuangan-pemkab-kampar-2017-ini-pesan-bupati-aziz).

www.Kamparkab.go.id (2018).

www.m.riau24.com/berita/baca/72742kampar-terima-opini-wtp-dari-bpk.

[www://pekanbaru.tribunnews.com/2018/10/19/video-capai-opini-wtp-menkeu-beripenghargaan-kepada-pembkab-kampar](http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/10/19/video-capai-opini-wtp-menkeu-beripenghargaan-kepada-pembkab-kampar).

Yuliza. (2018). Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan, Penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan
Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Empiris Pada OPD
Kabupaten Rokan Hilir). *Jom Feb*. 1 (45),
p. 39